

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI IV DPR RI
(BIDANG PERTANIAN, KEHUTANAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN,
DAN PANGAN)**

- Tahun Sidang : 2014-2015
Masa Persidangan : II
Rapat Ke- : 11
Jenis Rapat : Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, tanggal : Senin, 26 Januari 2015
Waktu : Pukul 10.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV)
Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta
- Acara : - Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun 2014;
- Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2014;
- Program Kerja Tahun 2015;
- APBN-P Tahun 2015; dan
- Rencana Kerja dan Arah Kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019.
- Ketua Rapat : Edhy Prabowo, MM., MBA.
Sekretaris Rapat : Drs. Budi Kuntaryo
Hadir : A. 41 Anggota dari 50 Anggota Komisi IV DPR RI
B. Hadir Pemerintah:
1. Susi Pudjiastuti (Menteri Kelautan dan Perikanan);
 2. Prof. Ir. Sjarief Widjaja, Ph.D., F.RINA (Sekretaris Jenderal);
 3. Andha Fauzie M, Ak.,M.S.I.S (Inspektur Jenderal);
 4. Dr. Ir. Gellwynn Daniel Hamzah Jusuf, M.Sc. (Direktur Jenderal Perikanan Tangkap);
 5. Dr. Ir. Slamet Soebjakto M.Si. (Direktur Jenderal Perikanan Budidaya);
 6. Laksda TNI (Purn) Asep Burhanuddin. (Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan);
 7. Ir. Saut Parulian Hutagalung, M.Sc. (Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan);
 8. Dr. Sudirman Saad, SH. M.Hum. (Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil);
 9. Dr. Ir. Suseno, MM (Kepala Badan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan);
 10. Dr. Ir. Ahmad Poernomo, M.App.Sc. (Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan); dan
 11. Narmoko Prasmadji SH., MH. (Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan) beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Kelautan dan Perikanan dalam rangka membahas Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun 2014, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2014, Program Kerja Tahun 2015, APBN-P Tahun 2015, dan Rencana Kerja dan Arah Kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019, pada hari Senin tanggal 26 Januari 2015, dibuka pukul 10.00 WIB oleh Ketua Rapat Edhy Prabowo, MM., MBA. dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

1. Komisi IV DPR RI menerima laporan dan memberikan apresiasi atas realisasi APBN Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2014 sebesar Rp5.817.960.377.475,- atau 94,32% dari pagu Tahun 2014 sebesar Rp6.168.627.392.000,-. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan agar lebih meningkatkan serapan pada APBN Tahun Anggaran 2015.
2. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan atas tindak lanjut terhadap temuan BPK RI pada Laporan Keuangan Tahun 2013. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menyelesaikan berbagai temuan baik yang menyangkut pemeriksaan laporan keuangan, sistem pengendalian internal, maupun kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan.
3. Komisi IV DPR RI menerima usulan pagu RAPBN-P Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015 sebesar Rp10.594.605.251.000,- dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Pagu APBN Tahun 2015 sebesar Rp6.726.015.251.000,-;
 - b. Alokasi tambahan RAPBN-P Tahun 2015 berdasarkan Surat Kementerian Keuangan No.S-876/MK.02/2014 tanggal 24 Desember 2014 sebesar Rp1.849.690.000.000,-; dan
 - c. Pengalihan alokasi tambahan RAPBN-P Tahun 2015 berdasarkan Surat Kementerian Keuangan No.S-9/MK.02/2015 tanggal 8 Januari 2015 sebesar Rp2.018.900.000.000,-.Komisi IV DPR RI akan membahas sesuai dengan mekanisme yang berlaku, selanjutnya meminta agar Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengkoordinasikan dengan instansi lainnya.
4. Komisi IV DPR RI mendukung arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2015-2019, untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan khususnya bagi nelayan dan pembudidaya ikan, keterpeliharaan daya dukung ekosistem pesisir dan laut, serta mengembangkan potensi sumber daya kelautan dan perikanan serta kearifan lokal yang dilakukan secara berkelanjutan.
5. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan oleh pemangku kepentingan di bidang kelautan dan perikanan antara lain:
 - a. Memberikan kepastian usaha kepada seluruh pemangku kepentingan di bidang kelautan dan perikanan yang merupakan kewajiban Pemerintah;
 - b. Meninjau ulang Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 dengan tetap memberikan bahan bakar minyak bersubsidi kepada nelayan tanpa membatasi ukuran/tonase kapal;

- c. Meninjau ulang Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 56 dan 57 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 1 dan 2 Tahun 2015 antara lain dengan menerbitkan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis dengan melibatkan para pemangku kepentingan di bidang kelautan dan perikanan; dan
 - d. Memberikan subsidi pakan, benih, dan obat-obatan bagi pembudidaya ikan.
6. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menghentikan sementara reklamasi Teluk Jakarta dan tidak melanjutkan rencana reklamasi Teluk Benoa, serta mengkaji ulang prosesnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
 7. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan sosialisasi dan konsultasi publik terhadap setiap kebijakan yang dikeluarkan terkait dengan kepentingan rakyat dan pemangku kepentingan, demi menjaga keharmonisan dalam dunia usaha dan dapat bermanfaat bagi kemajuan daerah, masyarakat nelayan dan wilayah pesisir.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 21.45 WIB.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,

Ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

KETUA RAPAT,

Ttd.

EDHY PRABOWO, MM., MBA.
A-335

